Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) >> Buku

Mungkinkah mewujudkan polisi yang bersih

Adrianus E. Meliala

Deskripsi Lengkap: https://library.stik-ptik.ac.id/abstrakpdfdetail.jsp?id=24710&lokasi=lokal

---

Abstrak

Kemitraan merupakan wadah kerja sama antara Pemerintah Indonesia Masyarakat sipil sektor swasta di Indonesia dan masyarakat Indonesia yang bertujuan memfalitasi dan mendukung pembaharuan tata pemerintahan di Indonesia.
Kemitraan hadir untuk menyatukan semua unsur dalam masyarakat dan Pemerintah Indonesia yang memiliki komitmen untuk memperbaharui tata pemerintahan dan untuk mendorong terciptanya dialog dan jaringan diantara mereka, Kemitraan bertujuan untuk mendukung usaha-usaha mereka untuk mengembangkan gagasan strategi dan program. Terutama uaha-usaha yang dapat dibantu oleh masyarakat Internasional.
VISI
Kemitraan mencita-citakan terbentuknya masyarakat yang mempromosikan pembaharuan tata pemerintahan menuju Indonesia yang adil, demokratis dan sejahtera.
MISI
Mempromosikan pembaharuan tata pemerintahan dimana penyampaian keputusan dan alokasi sumber daya didasarkan pada keterlibatan seluruh pihak berkepentingan, berfokus, pada kesetaraan jender dan melibatkan kelompok-kelompok yang kurang memperoleh kesempatan. Menjadi model tata pemerintahan yang baik dan kemampuan yang setara.
PROGRAM
Kemitraan akan membuktikan pekerjaannya pada enam program prioritas yang pada dasarnya saling berhubungan, Keenam program prioritas ini terdiri dari empat program sektoral-pembaruan pemilu dan lembaga legislatif, pembaruan hukum dan peradilan pembaruan pegawai negei, dan pembaruan keamanan kepolisian dan dua program yang berkaitan dan semua sektor crosscutting desentralisasi dan anti korupsi. Untuk menyikapi keenam program kemitraan akan melakukan kegiatan-kegiatan yang akan semakin mempertajam perspektif multi stacholdernya, Ini meliputi pengarusutamaan perspektiif kesetaraan jender dalam semua kegiatan mengikuti perjalanan tata pemerintahan perspektif 2002 dan mendukung-kegiatan-kegiatan tambahan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha dalam parlemen tata pemerintahan.